



RELEASE
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI
KE INGGRIS
MEGENAI PENGAWASAN TERHADAP SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI
INGGRIS
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024

=====

Pada tanggal 7-13 Mei 2024, Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Inggris. Tujuannya adalah memastikan bahwa produk Inggris yang di ekspor ke Indonesia terjamin kehalalannya. Hal ini sebagai perwujudan dari amanah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang di antaranya menyebutkan bahwa semua produk yang beredar di wilayah hukum Indonesia harus bersertifikat halal. Komisi VIII DPR RI pada Kunjungan Kerja Inggris melakukan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia di Inggris, lembaga-lembaga halal di Inggris, dan melakukan kunjungan lapangan ke tempat penyembelihan kambing dan pabrik obat serta berkunjung ke *Indonesian Islamic Center* di London. Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. Ashabul Kahfi, M.Ag., tersebut menghasilkan temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Temuan

1. Lembaga Penyedia Halal Luar Negeri (PHLN) perlu melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH sebelum memberikan sertifikat halal kepada produsen di Inggris yang akan mengirimkan produknya ke Indonesia.
2. Sejumlah produsen yang mengirimkan produknya ke Indonesia merasa sudah cukup dengan mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga di luar negeri. Padahal sertifikasi halal untuk produk-produk yang dikirimkan ke Indonesia hanya diakui apabila sudah disertifikasi oleh LPHN yang melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH.

B. Rekomendasi

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI perlu lebih gencar lagi melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga Penyedia Halal Luar Negeri (PHLN) agar dapat memberikan

perlindungan dan jaminan hukum terhadap produk-produk impor yang dikonsumsi oleh konsumen di Indonesia.

2. Komisi VIII DPR RI perlu didorong untuk ikut mensosialisasikan pelaksanaan sertifikasi halal di luar negeri sebagai bagian dari pengawasan atas implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

London, 13 Juli 2024.

Tim Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi VIII DPR RI ke Inggris.